EFEKTIVITAS SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER PRESIDENSIL DI INDONESIA

Ahmad Qaulan Syadid, Yanuardi
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: ahmadqaulan0812@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia currently adheres to a presidential system of government, where all policies and the highest command rest in the hands of the president. However, in this presidential system, public decision-making or policy-making is generally the result of negotiation between the executive and legislative branches, which can lead to indecisive decisions and prolonged processes. This study examines the effectiveness of the presidential system in Indonesia, particularly in the president's decision-making process. The main issue addressed is how the president manages relationships with the legislature and political parties to maintain government stability. The aim of this research is to understand the legal implications of this system in national life and to determine the most suitable system of government for Indonesia. The research method used is a literature review, analyzing relevant literature. The results show that the effectiveness of presidential decision-making in Indonesia is significantly influenced by the separation of powers, executive-legislative relations, and political party support. The study suggests the need for improved coordination and communication between government branches to enhance the stability and effectiveness of the presidential system in Indonesia.

Keywords: Presidential, effectiveness, Indonesia;

ABSTRAK

Indonesia saat ini menganut system pemerintahan presidensial, dimana semua kebijakan dan semua komando tertinggi berada di tangan presiden. Namun, pada system pemerintahan presidensial ini pembuatan keputusan atau kebijakan public umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislative sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Penelitian ini mengkaji efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, khususnya dalam proses pengambilan keputusan presiden. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana presiden mampu mengelola hubungan dengan legislatif dan partai politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari sistem pemerintahan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menentukan sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan analisis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengambilan keputusan presiden di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemisahan kekuasaan, hubungan eksekutif-legislatif, dan dukungan partai politik. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan dalam koordinasi dan komunikasi antara cabang-cabang pemerintahan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Kata Kunci: Presidensial, efektivitas, Indonesia;

PENDAHULUAN

Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya. Untuk melakukan hal tersebut negara harus memiliki sistem ketatanegaraan. Sistem-sistem tersebut salah satunya sistem pemerintahan. Pada dasarnya sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, kehidupan sosial, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan sendiri yang lazim diterapkan di negara-negara di dunia yakni sistem pemerintahan

presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial.(Fikri et al., 2022). Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (founding father) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei- 1 Juni dan 10-17 Juli 1945. Dalam hal ini Soepomo memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan pemerintahan Indonesia, karena gagasan yang dikeluarkannya itulah yang kemudian disetujui oleh peserta sidang (meskipun dengan perdebatan yang cukup rumit) (al-Arif, 2015).

Setiap negara dalam menjalankan pemerintahannya memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun dengan nama yang sama seperti sistem presidensial atau sistem parlementer. Baik sistem presidensial maupun sistem parlementer, sesungguhnya berakar dari nilai-nilai yang sama yaitu "demokrasi". Penerapan demokrasi dalam setiap negara mengambil bentuk yang berbeda-beda antara negara yang satu maupun negara lain, terkadang dalam sebuah negara dalam menjalankan demokrasi mengambil bentuk sistem parlementer, demikian pula terkadang suatu negara menjalankan sistem presidensial demi untuk mewujudkan demokrasi. Terkadang muncul anggapan bahwa sistem pemerintahan presidensial lebih unggul dan cenderung lebih stabil daripada parlementer. Anggapan ini merupakan anggapan yang tidak sepenuhnya benar, persoalan sebenarnya adalah tergantung bagaimana demokrasi dijalankan dalam sebuah negara. Tarik-menarik antara dua teori sistem pemerintahan tersebut mempunyai implikasi apakah suatu negara lebih dominan menyelenggarakan sistem presidensial atau parlementer.(Taufik, 2020)

Dalam sejarahnya Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak era Presiden Soekarno, namun dalam prakteknya terdapat dinamika yang menyertainya dan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan presidensial belum sepenuhnya digunakan. Pasca kemerdekaan pada saat itu Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi pernah mengalami perubahan menjadi sistem pemerintahan parlementer pada tahun 1929.(Castle, 1995). Pada saat menggunakan sistem pemerintahan parlementer Presiden Soekarno tidak memiliki kekuasaan secara langsung, karena kekuasaan dijalankan oleh para formatur untuk membentuk kabinet yang akhirnya terpilih kabinet pertama yang dipimpin Natsir mulai dari September 1945 sampai Maret 1951.(Ricklefs, 1991)

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek terkait Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Studi oleh (Madjid et al., 2018) menyatakan bahwa, "Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menawarkan stabilitas politik melalui pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, namun juga menghadapi tantangan berupa potensi kebuntuan politik antara kedua cabang pemerintahan." Sementara itu (Soetjipto et al., 2019) mengatakan, "Pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem presidensial di Indonesia." Lalu dalam penelitian lain oleh (Nurhasim et al., 2015) menjelaskan bahwa, "Efektivitas sistem presidensial di Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang stabil bergantung pada kemampuan presiden untuk mengelola hubungan dengan legislatif dan partai politik, serta mempertahankan dukungan publik."

Berdasarkan paparan di atas peneliti menemukan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Bagaimana Sistem Pemerintahan Parlementer Presidensial, yang kedua Bagaimana Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan yang ketiga Apa Sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia. Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji bagaimana Sistem Pemerintahan Parlementer Presidensial, Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan Sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena topik yang diangkat berkaitan dengan teori dan konsep yang sudah ada, serta relevansi literatur yang mendukung kajian ini sangat kuat. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, undang-undang, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. (Moleong et al., 2017)

Dalam penelitian studi kepustakaan, populasi dan sampel yang dimaksud adalah seluruh literatur yang terkait dengan Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami dan mensintesis pengetahuan yang sudah ada mengenai topik tertentu (Sabillah et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan melalui beberapa langkah berikut: (1) Identifikasi Topik Penelitian: Menentukan topik atau masalah yang akan diteliti. (2) Pengumpulan Sumber Informasi: Mengumpulkan berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian. (3) Evaluasi dan Seleksi Sumber: Menilai kualitas dan relevansi sumber yang dikumpulkan. Memilih sumber-sumber yang paling relevan dan memiliki kredibilitas tinggi. (4) Klasifikasi dan Organisasi Informasi: Mengorganisir informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan tema atau subtopik yang telah ditentukan. (5) Analisis dan Sintesis Informasi: Menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan disintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. (6) Penulisan Laporan Penelitian: Menyusun laporan penelitian yang memaparkan hasil dari studi pustaka, termasuk pembahasan dan kesimpulan. (Moleong et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan Parlementer Presidensial

Di negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan bentuk negara Republik, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan semi. Jika negara tersebut tidak menerapkan pemisahan kekuasaan, meskipun berbentuk Republik, maka sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer. Jadi, inti dari sistem pemerintahan presidensial terletak pada pemisahan kekuasaan. Secara umum, negara-negara demokrasi menerapkan sistem pemerintahan parlementer, presidensial, atau variasi dari keduanya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, menghasilkan bentuk-bentuk seperti quasi parlementer atau quasi presidensial (Sabrina et al., 2023).

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat, disebabkan oleh tanggung jawab menteri kepada parlemen. Kabinet yang dibentuk harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, sehingga kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh bertentangan dengan keinginan parlemen. (Fitryantica, 2019) Dalam sistem ini, eksekutif bertanggung jawab langsung kepada legislatif, yang berarti keberlangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas anggota legislatif. Jika eksekutif kehilangan dukungan mayoritas (misalnya karena mosi tidak percaya), eksekutif harus mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja, ratu, kaisar, atau presiden). Sistem parlementer ini berlanjut dari bentuk negara Monarki Konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, dan kepala negara adalah presiden, raja, atau ratu. (Hague, 2016)

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif meskipun kebijakannya tidak disetujui oleh legislatif. Dalam sistem ini, eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen dan dipilih secara

terpisah oleh rakyat. Sistem presidensial atau kongresional adalah sistem pemerintahan republik di mana eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dari legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari presiden yang dipilih rakyat, memimpin pemerintahan, dan mengangkat pejabat terkait; presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan tidak ada status yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif. (Hanan, 2016)

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena rendahnya dukungan politik. Namun, ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melanggar konstitusi, mengkhianati negara, atau terlibat dalam masalah kriminal, ia bisa dijatuhkan dan digantikan oleh wakil presiden. Dalam sistem ini, presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya dan dapat diberhentikan atas tuduhan dari House of Representatives setelah diputuskan oleh senat, seperti dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat. (D. Harter, 1893)

Sebagian besar negara di dunia menerapkan salah satu dari sistem pemerintahan tersebut, sementara sistem pemerintahan lainnya dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari keduanya. Inggris dianggap sebagai contoh ideal dari negara dengan sistem pemerintahan parlementer, disebut sebagai Mother of Parliaments, sedangkan Amerika Serikat adalah contoh ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial tidak mengenal lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang diformulasikan sebagai "Trias Politica" oleh Montesquieu. (Waldron, 2020) Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi.

Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

Implikasi Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat; sesuatu yang termasuk atau tersirat; tidak dinyatakan secara langsung; atau memiliki hubungan keterlibatan. Sementara itu, kata "dampak" berarti pengaruh kuat yang menghasilkan akibat, baik negatif maupun positif. Kata "akibat" sendiri memiliki arti sesuatu yang menjadi hasil atau kesudahan dari suatu peristiwa, serta persyaratan atau keadaan yang mendahului. Sedangkan "konsekuensi" berarti akibat dari suatu tindakan atau kesesuaian dengan yang telah terjadi sebelumnya (Cahyono et al., 2023).

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktiknya, banyak elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1949, Indonesia menerapkan sistem kabinet parlementer. Kemudian, antara tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu. Pada periode 1950-1959, Indonesia masih menggunakan sistem parlementer dengan demokrasi liberal yang juga bersifat semu. Dari tahun 1959-1966, Indonesia menganut sistem demokrasi Terpimpin. Meskipun UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara dengan sistem presidensial, terjadi penyimpangan setelah tiga bulan dengan dibentuknya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai perdana

menteri Kabinet I. Pada masa itu, Belanda juga menerapkan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia.

Beberapa alasan pembentukan kabinet parlementer adalah: pertama, untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu) bahwa Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi, dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan sistem demokrasi liberal. Kedua, untuk menyelamatkan Indonesia dari pemerintahan yang diktator dan otoriter, karena pada saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat dominan dan dikhawatirkan akan menuju ke arah kediktatoran. Sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia berlangsung selama satu dekade dan ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Sistem presidensial baru terlihat menonjol pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. (Sukadi, 2021)

Pembangunan sistem pemerintahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh perbandingan dengan sistem pemerintahan negara lain. Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia banyak mengadopsi praktik-praktik pemerintahan dari Amerika Serikat, seperti pemilihan presiden langsung dan mekanisme checks and balances. Konvensi Partai Golkar menjelang pemilu tahun 2004 juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik pemerintahan di Indonesia meniru sistem pemerintahan Amerika Serikat. Misalnya, Indonesia memiliki lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tidak ada di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan bahan perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah membuktikan diri sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang ideal. Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut kemudian banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia, dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing negara.

Sistem pemerintahan yang cocok untuk indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami di Indonesia saat ini merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan corak yang berbeda. Berdasarkan UUD, praktik demokrasi di Indonesia berkembang dalam tiga masa utama:

- (1) Masa Republik Indonesia I: Pada masa ini, peran parlemen dan partai-partai politik sangat menonjol, sehingga dinamakan demokrasi parlementer.
- (2) Masa Republik Indonesia II: Dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang menjadi dasar formalnya dan lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat.
- (3) Masa Republik Indonesia III: Dikenal sebagai masa demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional dengan penekanan pada demokrasi presidensial. Masa ini berakhir dengan jatuhnya rezim Orde Baru, yang kemudian membawa Indonesia memasuki era reformasi. Era ini ditandai dengan perubahan UUD 1945 yang lebih menonjolkan kebebasan berpolitik dan penguatan sistem presidensial. (sunny, 1987)

Menurut Soehino, perkembangan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa masa sebagai berikut:

- a) 18 Agustus 1945 - 14 November 1945: Menganut sistem demokrasi konstitusional.
- b) 14 November 1945 - 5 Juli 1959: Menganut sistem demokrasi liberal.
- c) 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968: Menganut sistem demokrasi terpimpin.
- d) 21 Maret 1968 - sekarang (berakhir pada tahun 1998 dengan jatuhnya Orde Baru): Menganut sistem demokrasi Pancasila.

Demikian (Soemantri, 1976), menyatakan bahwa semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi Pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa secara materiil, demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi Pancasila.

Lalu (Soemantri, 1976) juga mengatakan bahwa demokrasi Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu formal dan material. Secara formal, UUD 1945 menganut demokrasi tidak langsung, di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR. Demokrasi ini juga dipandang sebagai falsafah bangsa. Secara umum, diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah sistem presidensial. Namun, jika diteliti lebih lanjut struktur dan sejarah penyusunan UUD NRI 1945, sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukanlah perpaduan antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris, melainkan kombinasi antara model Indische Staatsregeling (Konstitusi kolonial Hindia Belanda) dan sistem pemerintahan sosialis model Uni Soviet.

Demokrasi secara umum berarti pemerintahan oleh rakyat, yang mendasarkan urusan kenegaraan pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan pada dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Padmo Wahyono menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah kegiatan bernegara di Indonesia, dan pemilu dalam segala bentuknya adalah salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.

Demikian halnya yang lain yang dinyatakan oleh (Soemantri, 1976), bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi pancasila, lebih lanjut (Soemantri, 1976) mengatakan: "Kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang dikatakan indirect demokrasi dengan, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa". Rupanya secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI 1945 itu adalah sistem presidensial.

Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD NRI 1945 maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model Indische Staatsregeling ('Konstitusi' kolonial Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Soviet. (Westra, 1934) Demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Dalam hal ini Padmo Wahyono menyatakan, bahwa Demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara di Indonesia, dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila. (Yani, 2018)

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah kombinasi antara sistem presidensial dan parlementer, mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas negara terhadap perubahan politik dan sejarah. Meskipun secara konstitusional Indonesia mengadopsi sistem presidensial, dalam praktiknya banyak elemen dari sistem parlementer yang diterapkan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan

yang dipengaruhi oleh sejarah, kondisi politik, dan pengaruh internasional. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan elemen-elemen dari sistem pemerintahan global.

REFERENSI

- al-Arif, M. Y. (2015). Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(2), 238–254. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art4>
- Cahyono, S., Jihan, A. N., Hasanah, A. F., & Setiabudi, D. I. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERKARAKTER MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM AL ZAYTUN INDONESIA. 3.
- Castle, H. F. (1995). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. PT Pustaka LP3ES.
- D. Harter, M. (1893). In the House of Representatives. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*.
- Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. F. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*.
- Hague, R. (2016). Executives. *In Comparative Government and Politics*.
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu Dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*.
- Madjid, & Nur. (2018). Keunggulan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*.
- Moleong, & J, L. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Nurhasim, & Mochamad. (2015). Efektivitas Sistem Presidensial dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Stabil di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Lokal*.
- Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada University Press.
- Sabillah, M., Syamsudin, P. I., Sulthan, R., & Setiabudi, D. I. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA PGMI INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA. 2.
- Sabrina, R., Ayunda, S., Aminah, S., & Setiabudi, D. I. (2023). UPAYA PENINGKATAN KESADARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PENGHAYATAN LAGU INDONESIA RAYA 3 STANZA DI MI AL ZAYTUN. 2.
- Soemantri, S. (1976). Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN. *Tarsito Bandung*.
- Soetjipto, & Ani. (2019). Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.
- sunny, I. (1987). Mekanisme Demokrasi Pancasila. *Aksara Baru, Jakarta*.
- Taufik, M. (2020). DINAMIKA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI INDONESIA. 1(2).
- Waldron, J. (2020). Separation of Powers in Thought and Practice? *Revista de Direito Administrativo*.
- Westra, H. (1934). Justitie. *In De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*.
- Yani, A. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution*.